

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, Mochamad, dkk., 2022, *Konsep dan Implementasi Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Ditempuhnya Upaya Administratif*, Kencana. Jakarta.

Dewi, Endah, 2021, *Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Cyber Law Terkait Data Privasi dan Beschikking Digitalisasi*, PT. Alumni, Bandung

Efendi, A'aan, dan Freddy Poernomo, 2022, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Efendi, Joenadi, dan Prasetyo Rijadi, 2022, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta.

Hadjon, Philipus M, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Kusdarini, Eny Kusdarini, 2020, *Asas-Asas Umum pemerintahan yang Baik dalam Hukum Administrasi Negara*, UNY Press, Yogyakarta.

Laritmas, Selfianus, dan Ahmad Rosisdi, 2024, *Teori-Teori Negara Hukum*, Kencana, Jakarta.

Nurfransiska, Ferika, 2023, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Ruang Karya, Kalimantan Selatan.

Marbun, SF, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- Nugraha, Satria, 2024, *Metode Penelitian Hukum*, Ruang Karya, Banjar.
- Pratama, Harrys, dan Ojarudin Ritonga, 2022, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Pedoman dan Praktik Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara*, Andi, Yogyakarta.
- Pamuji, Kadar, dkk., 2023, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, Unsoed Press, Purwokerto.
- Prio, Aris, dkk., 2024, *Hukum Peradilan TUN (Tata Usaha Negara)*, Pustakabarupress, Yogyakarta.
- Riawan W, 2020, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Riawan, W, 2023, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara : Filosofi, Teori, dan Praktik*, PT. Kansius, Yogyakarta.
- Sudrajat, Tedi dan Endra Wijaya, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Winarno, Ronny, 2023, *Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*, Literasi Nusantara Abadi, Malang.

B. Jurnal

- Addi, Muhammad, dan Fandi Nur. (2020). *Problematik Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa di Peradilan Administrasi Indonesia (Studi Kritis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019)*: Jurnal Widya Pranata Hukum, 2(1), 19-39.

- Adiguna, Muhammad. (2018). *Onrechtmatig Overheidsdaad Oleh Pemerintah Dari Sudut pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*: Jurnal Hukum Peratun, 1(2), 265-286. DOI: <https://doi.org/10.25216/peratun.122018.265-286>
- Arzhi, Firzhal. (2019). *Upaya Administratif dan Penerapannya dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi*: Jatiswara, 34(2), 132-142. DOI: <https://doi.org/10.29303/jtsw.v34i2.203>
- Dwi, Erna, dan Nabilatus Sa'adah. (2021). *Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*: Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(1), 34-44. DOI: <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.34-45>
- Erysta, Fellista, dan Lega Sugiarto. (2018). *Pemaknaan Perluasaan Objek Segketa Tata Usaha Negara yang Meliputi Tindakan Faktual*: Justiciabelen, 1(1), 41-70. DOI: <http://dx.doi.org/10.30587/justiciabelen.v1i1.492>
- Fahresi, Firly, Josephus, Reymen. (2021). *Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui Upaya Administratif Menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*: Lex Administratum, 9(8), 56-65.
- Halila, Siti, dan Mhd Fakhurrahman. (2021). *Asas Kepatian Hukum Menurut Para Ahli*: Jurnal Hukum Tata Negara, 4(2), 56-65. DOI: <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/334>
- Kawi, I Komang, dan I Gede Arya. (2021). *Kepastian Hukum Ketentuan Upaya Administratif Pasca Di Keluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun*

- 2014 *Tentang Administrasi Pemerintahan*: Jurnal Hukum, 9(2), 97-110. DOI: <https://doi.org/10.37637/kw.v9i2.889>
- Koraag, Satria, Roosye Sarapun, dan Symsia Midu. (2021). *Terjadinya Sengketa Tata Usaha Negara Akibat Dikeluarkannya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara*: Lex Administratum, IX(7), 75-85.
- Marthen, Roy, dkk., (2022). *Upaya Administratif Dalam Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara*: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 9(3), 34-44.
- Martono, Yudi. (2016). *Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*: Jurnal Hukum dan Peradilan, 5(1), 135-154. DOI: <https://doi.org/10.25216/jhp.5.1.2016.135-154>
- Putrijanti, Aju. (2015). *Kewenangan serta Obyek Sengketa di pengadilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No. 30/2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*: Masalah-Masalah Hukum, 44(4), 425-428.
- Raziv, Muhammad, Anna Erliyana. (2021). *Pergeseran Kompetensi Absolut dari Pengadilan Umum ke Peradilan Tata Usaha Negara: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (Onreelmstige Overheidsdaad)*: Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(4), 824-848. DOI: <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no4.3290>

- Sahrina, dkk., (2022). *Upaya Administratif Sebagai Instrumen Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik Bagi Masyarakat*: Halu Oleo Law Review, 6(2), 208-217. DOI: <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.6>
- Tahir, Erdin, dkk., (2024). *Model-Model penilaian Sengketa Tindakan Faktual Oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara*: Jurnal Yustitia, 10(2), 149-172. DOI: <https://doi.org/10.31943/yustitia.v10i2.284>
- Wahyudi, Eko. (2011). *Peranan Politik Hukum Dalam Pembangunan Hukum Progesif Sebagai Hukum Yang Pancasila*: Jurnal Liga Hukum, 300-317.
- Yusuf, Ahmad, dan Arif Wibowo. (2023). *Penyelesaian Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara Melalui Upaya Administratif*: Jurnal Penelitian Multi Disiplin, 2(1), 128-134. DOI: <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.111>

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1586).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 940).

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor:
16/G/TF/2023/PTUN.BDG.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:
75/G/TF/2023/PTUN.SBY.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:
115/G/TF/2024/PTUN.SBY.

E. Website

Website Pengadilan Tata Usaha Surabaya. *Pemeriksaan Perkara*.
<https://www.ptun-surabaya.go.id/pemeriksaan-perkara/>, diakses pada
tanggal 25 September 2025.

Website Pengaturan Tata Usaha Negara Jayapura. *Informasi Pendaftaran Perkara
Secara Online*. [https://ptun-jayapura.go.id/layanan-hukum/prosedur-
pengajuan-gugatan-dan-biaya_perkara/informasi-pendaftaran-perkara/](https://ptun-jayapura.go.id/layanan-hukum/prosedur-pengajuan-gugatan-dan-biaya_perkara/informasi-pendaftaran-perkara/),
diakses pada tanggal 25 September 2025.